

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 8 Tahun 2011. Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU Nomor 5 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004.

B. Buku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018

Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Permana, Tri Cahya Indra. *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press, 2016.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- R. Wiyono, S.H. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sangadji. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN (dalam gugatan pembatalan sertifikat tanah)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- _____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soemaryono dan Anna Erliyana. *Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988

C. Lain-lain

- Bambang Heriyanto. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Pakuan Law Review*, diterbitkan oleh Balibangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia. Vol. 25 No. 2 Tahun 2018.